

	SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman	
	Vol. 1 No. 2 (2022) xx-xx	E-ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

Intruksi Presiden Sebagai Hasil dari Upaya Mediasi Konflik di Konflik Poso

Ida Hanifah, Cica Mulansari
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email:

Abstract

The purpose of this writing is to find out and analyze how the President's Instructions are an effort to mediate conflict in the Poso conflict. The research method in this paper uses the method of library research (library research) obtained from various sources of literature (books, literature, articles, magazines, websites, journals, research results and so on) with qualitative data analysis. The results of this study concluded that there were two main factors that became the basis for the conflict in Poso, namely the dominance of religion and the transfer of power both economically, socially and politically. By making efforts to resolve the representation between the two parties in order to find peace, then the Presidential Instruction No. policy was issued. 14 of 2005 which consists of: 1) In carrying out handling of Poso must be coordinated in an integrated and comprehensive manner. 2) Every case of crime and terror must be handled firmly. 3) In carrying out the handling efforts, he still pays attention to the Malino Declaration on December 20, 2001.

Keyword: Conflict, Poso, Mediation, Presidential Instruction

Abstrak

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Intruksi Presiden sebagai upaya dari mediasi konflik di konflik Poso. Metode penelitian di dalam tulisan ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (buku, literatur, artikel, majalah, website, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya) dengan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi dasar terjadinya konflik di Poso yaitu dengan adanya dominansi agama dan perpindahan kekuasaan baik secara ekonomi, sosial dan politik. Dengan dilakukan upaya

penyelesaian perwakilan antar kedua pihak agar menemukan sebuah kedamaian, kemudian keluarlah kebijakan Intruksi Presiden No. 14 Tahun 2005 yang terdiri dari: 1) Dalam melaksanakan penanganan Poso harus dikoordinasikan dengan terpadu dan komprehensif. 2) Setiap kasus kriminal dan teror harus ditangani dengan tegas. 3) Dalam melakukan upaya penanganan tetap memperhatikan Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember 2001.

Kata kunci : Konflik, Poso, Mediasi, Intruksi Presiden

Pendahuluan

Konflik adalah suatu fenomena yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, karena pada hakikatnya manusia hidup untuk menyelesaikan masalah. Bahkan manusia biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa berawal dari banyaknya masalah atau *problem* di dalam kehidupannya baik masalah dengan keluarga, teman, guru, bahkan dengan diri sendiri. Dari banyaknya masalah seorang diri belajar mengambil hikmah dari setiap kejadian yang telah dilaluinya, sehingga dari sebuah masalah seorang diri mampu belajar dalam mengontrol emosi, keadaan dan situasi dengan bijak ketika dihadapkan sebuah *problem* di episode kehidupan yang akan datang.

Konflik Poso merupakan salah satu konflik terlama di Indoneisa yang menyebabkan banyak kerugian dan pertumpahan darah. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam upaya menanggulangi konflik di Poso. Konflik berawal dari adanya isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, ekonomi dan politik. Dan dari isu dapat dilihat bahwa faktor utama bukan hanya didominasi oleh agama tetapi dengan adanya perpindahan kekuasaan baik secara ekonomi, sosial dan politik (Tjadra Ariwwiboowo: 2021).

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi di

Poso dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Setelah itu akan dipaparkan juga Instruksi Presiden sebagai bentuk resolusi konflik yang dilakukan untuk mendamaikan masyarakat Poso yang terlibat konflik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti dalam pendekatan studi pustaka. Dalam upaya menjelaskan dan menginterpretasikan proses penyelesaian konflik Poso, penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber kepustakaan (buku, jurnal, internet, website, majalah, hasil penelitian dan lain sebagainya). Penyajian tulisan ini akan berbentuk suatu laporan deskriptif yang menjelaskan fenomena di Konflik Poso.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan di secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan terduga suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian

kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. (Sugianto, 2021)

Pembahasan

A. Kronologi Konflik di Poso

Konflik Poso pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 1998, terjadi di wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi awal mulanya disebabkan karena adanya pertikaian antar pemuda yang berbeda agama yaitu Islam dan Kristen. Akibat dari peristiwa pertikaian antar pemuda membuat sentiment agama antara agama Islam dengan agama Kristen. Kebetulan momentum kejadian tersebut bertepatan dengan perayaan natal dan bulan puasa, dan juga bertepatan dengan situasi politik yang sedang terjadi di Poso, dengan adanya isu permasalahan pemilihan Bupati di Poso.

Momentum tersebut dijadikan sebagai kambing hitam oleh oknum elit politik lokal agar dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi dan menghimpun massa berdasarkan agama untuk kepentingan politiknya dalam persaingan pemilihan jabatan bupati di Poso. Sehingga peristiwa yang awalnya terjadi pertikaian antar pemuda beda agama kemudian menjadi isu konflik masalah yang sangat besar antar agama yang berbeda di Poso (Igneus Alganih: 2016)

Konflik Poso ini terjadi bersamaan ketika jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto ditahun 1998 yang mengakibatkan pola pemerintahan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan yang berdampak

kepada berbagai macam bidang seperti, politik, ekonomi, sosial budaya serta menimbulkan rasa trauma psikologi yang sangat mendalam dimasyarakat Poso, terutama psikologi trauma anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma kekerasan, pelecehan seksual ketika kerusuhan sedang terjadi. Konflik di Poso menjadikan makna dari Bhineka tunggal Ika yang masih menjadi cita-cita bangsa untuk diperjuangkan kembali (Igneus Alganih: 2016)

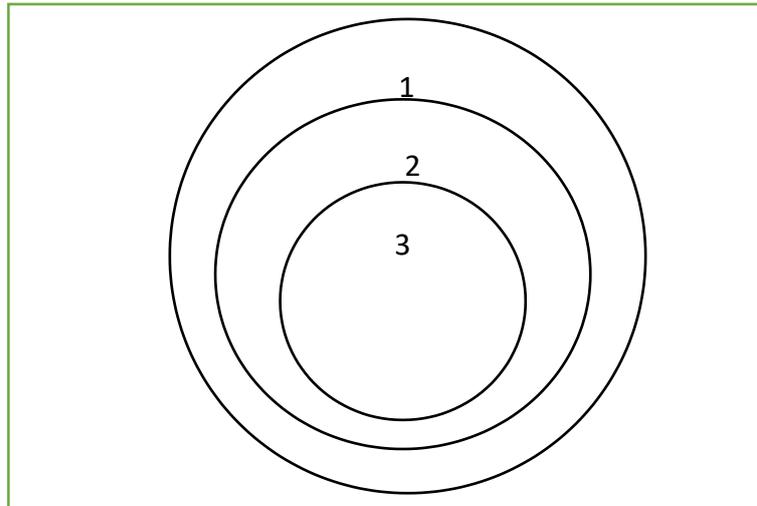
Konflik Poso berlatar belakang SARA (suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan), yang merujuk kepada disintegrasi bangsa. Di mana pada masa itu Indonesia sedang memasuki era reformasi ditandai dengan jatuhnya rezim Order Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto rakyat Indonesia mengalami euforia, seperti kebebasan dalam berpolitik, lebih demokratisnya pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah.

Seiring berjalannya waktu setiap kali pemilihan bupati daerah di Poso selalu di rotasi berdasarkan dua Agama di Poso yaitu Islam dan Kristen. Rotasi power sharing ini dimulai pada jabatan Bupati periode tahun 1967-1973, dipegang oleh Galib Lahasido dari kelompok Islam, dan kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto jabatan bupati dipegang oleh Koewandi (1973-1984) dari kelompok Kristen. Sampai seterusnya dan sampai berakhir pada periode Bupati Arief Patanga tahun 1999, ketika diterapkannya sistem demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Namun, perseteruan sengit dalam bidang politik tidak begitu hilang dan berubah seterusnya menjadi lebih baik. Tetapi

justu persaingan sengit dalam politik rupanya masih terus bermunculan dengan adanya rasa terintimidasi dari salah satu pihak penduduk asli sehingga masalah atau problema lama terkuak kembali (Igneus Alganih: 2016).

B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Poso

Konflik Poso disebabkan oleh adanya salah satu faktor permasalahan yang berkaitan dengan problema historis di mana masalah tersebut menyangkut permasalahan antara penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang yaitu Islam. Dengan adanya penduduk pendatang Islam menjadikan penduduk asli Poso atau kelompok Kristen merasa tersingkirkan terutama dari pusaran kekuasaan politik di pemerintahan Kabupaten Poso. Selain itu sebab dari adanya konflik Poso juga disebabkan oleh faktor antropologinya, di mana kondisi keberagaman perbedaan adat istiadat dan karakter etnis suku yang berbeda juga menjadikan sebab konflik sosial yang sangat rentan sehingga masyarakat menjadi mudah terprovokasi dari adanya konflik Poso terjadi.⁵ Konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik yang tidak hanya berdominasi agama, tetapi juga adanya perpindahan kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. Jika dianalisis dengan diagram bawang (ring onion) maka faktor konflik yang terjadi di Poso adalah sebagai berikut.



Tabel 1. Diagram Bawang (onion rings)

Keterangan:

1. Merupakan kulit terluar atau dalam hal ini merupakan faktor yang muncul di permukaan atau faktor yang terlihat, dalam konflik Poso faktor yang terlihat sebagai penyebab konflik adalah faktor agama, yaitu antara agama Kristen dengan agama Islam.
2. Lapisan kedua merupakan faktor yang tertutup oleh faktor yang terlihat, biasanya faktor ini jarang diketahui oleh masyarakat umum, dalam konflik di Poso, faktor ini disebabkan oleh adanya sentiment yang ada di Poso,
3. Dan lapisan yang terdalam adalah lapisan inti atau biasa disebut akar dari permasalahan, biasanya faktor yang muncul karena faktor ekonomi, dalam konflik di Posos, bisa juga dari struktu negara.

C. Instruksi Presiden sebagai Upaya Resolusi Konflik di Poso

Dalam hal penanganan masalah di Poso, ada beberapa langkah untuk diinstruksikan. Pertama, Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi konflik Poso dengan adanya Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 2005 dengan mengetahui beberapa pejabat dan menteri-mentri penting RI dengan diadakannya percepatan penanganan pertikaian Poso dengan menggunakan langkah-langkah komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi. Melakukan penegasan terkait setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror sampai terungkap jaringannya. Upaya penanganan pertikaian Poso tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.

Instruksi Presiden terhadap menanggapi pertikaian Poso juga memberikan beberapa ketentuan dan tindakan kepada para menteri sesuai dengan bidang dan perannya masing-masing, agar pertikaian Poso tetap terpantau melalui beberapa penugasan agar Pertikaian Poso mampu terminimalisirkan. Selain itu Instruksi yang dibuat Presiden RI juga membuat program teknis serta dukungan anggaran untuk diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden RI sesuai dengan bidang penugasan dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan langkah-langkah komprehensif ini dilakukan selama enam bulan sejak keluarnya Instruksi Presiden.

Adanya pelaporan pelaksanaan Instruksi Presiden secara periodik ketika sewaktu-waktu diperlukan. Adanya Instruksi Presiden ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengamanan dan bentuk mengurangnya

pertikaian yang ada di Poso. Sesuai dengan lembar pengesahan Intruksi Presiden mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan di Jakarta, 12 Oktober 2005 Presiden Republik Indonesia dengan bertanda tangan DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia: 2005).

Daftar Pustaka

- Alganih, Igneus. 2016. "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)" dalam Jurnal Criksetra edisi Vol. 5, No. 10, Agustus 2016.
- Handayani, Rizky Sri dan Adije, Hanna . 2020. "Konflik Poso; Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya" dalam jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial edisi Vol. 13, No. 1, 20 Juni 2020.
- Ariwibowo, Tjandra. 2021. " Konflik Poso dalam Perspektif Peperangan Asimetris" dalam Jurnal Ilmiah Indonesia edisi Vol. 6, No. 4, April 2021.
- Wijaya, Nanang. "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso" dalam Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik edisi Vol. 2, No. 1.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. "Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso" : Jakarta.
- https://roboguru.ruangguru.com/question/salah-satu-upaya-pemerintah-dalam-mengatasi-konflik-konflik-poso-adalah-dengan-mengeluarkan-intruksi_ICh7Vgp8O1l